

**BAB IV**

**PROSES PEMBAGIAN DALAM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI  
HASIL) TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING  
KABUPATEN KAUR**

Pada dasarnya, sistem pembagian hasil yang akan diterapkan dalam suatu perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak sesuai hukum adat Besemah. Sistem pembagian perjanjian kawukan ternak diterapkan adalah tergantung dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar sewaktu aqad berlangsung, kalau misalnya si pengawuk ingin menumpang dua kaki berarti menumpang setengah, dengan demikian pengawuk menunggu sampai hewan ternak tersebut beranak satu ekor sehingga pengawuk akan mendapatkan anak ternak dan dengan demikian setelah mereka selesai melaksanakan pembagian berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka si pemilik dan si pengawuk bisa berakhir, namun seandainya ingin diteruskan lagi tergantung dengan kesepakatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tamang, Bapak Karsun, dan Bapak Agus, menyatakan bahwa:<sup>54)</sup>

1. Perjanjian kawukan ini dapat diperbaharui di pertengahan jalan, sehingga perjanjian kawukan ini tidak bersifat tetap.
2. Apabila kawukan satu kaki berarti pihak yang melakukan kawukan akan mendapat satu ekor ternak setelah berkembang biak sebanyak tiga ekor.

---

<sup>54)</sup> wawancara dengan Bapak Tamang, Karsun, dan Agus (Pengawuk ternak), tanggal 19 Mei 2014

3. Apabila kawukan satu kuku berarti pihak yang melakukan kawukan mendapatkan satu ekor ternak setelah berkembang biak sebanyak tujuh ekor tenak.
4. Apabila sapi tersebut berkembangbiak dan menghasilkan sapi jantan maka pembagian hasilnya tetap sama seperti sapi betina.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemuka-pemuka adat bahwa mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembagian hasil kawukan ternak di atas bahwa setiap masyarakat yang melakukan bagi hasil pemeliharaan ternak pembagian hasilnya akan dibagi seperti yang telah disebutkan di atas, karena hal seperti itu sudah menjadi adat di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Menurut pengawuk ternak dari masing-masing desa yakni Desa Pelajaran, Desa Tanjung Kemuning, dan Desa Tinggi Ari yang telah disebutkan di atas yang telah melakukan perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak ini, menyatakan bahwa hewan ternak yang akan dikawukan hanya ternak betina saja, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku ini akan mendapatkan anaknya, hanya saja sistemnya menunggu sampai hewan ternak yang diperjanjikan tersebut beranak dan sistem bagi hasil dengan melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan tersebut.<sup>55)</sup>

---

<sup>55)</sup> Wawancara dengan Bapak Tamang, Karsun, dan Agus (Pengawuk ternak), tanggal 18 Mei 2014

Berdasarkan wawancara dengan pemuka adat Bapak Alian, Bapak Sailin dan Bapak N. Saudi bahwa pembagian hasil dalam kawukan ternak sapi seperti ini sudah ada dari dahulu secara turun-temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi adat setempat.<sup>56)</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tinggi Ari yaitu Bapak Bunirwan yang juga pemilik ternak dengan mengkawukan (bagi hasil) ternak menyatakan bahwa ternak yang dikawukan telah berkembangbiak dimana ternak tersebut menghasilkan 3 (tiga) ekor anak ternak maka hal ini pembagian hasilnya yakni satu ekor untuk si pengawuk, 2 (dua) ekor anak dan ternak yang dikawukan kembali menjadi untuk si pemilik. Hal ini senada dengan pendapat Bapak Bunirwan di Desa Tanjung Kemuning bahwa setelah mereka selesai melaksanakan pembagian berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka si pemilik dan si pengawuk bisa berakhir. Namun seandainya ingin diteruskan lagi tergantung dengan kesepakatan mereka.<sup>57)</sup>

Jadi dalam pembagian sistem kawukan (bagi hasil) ternak yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning menurut adat Besemah menunjukkan bahwa pembagian ternak yang di kawukan setelah berkembangbiak di anggap sudah adil karena anak yang diperoleh si pengawuk yaitu anak pertama ternak yang di kawukan, tetapi tergantung dengan sistem perjanjian kawukan sewaktu aqad berlangsung. Apabila si pengawuk menumpang membeli dengan sistem perkuku maka si pengawuk akan mendapatkan anak ternak pertama setelah

---

<sup>56)</sup> Wawancara dengan Bapak alian, sailin, N. Saudi (Pemuka Adat), tanggal 15 Mei 2014

<sup>57)</sup> Wawancara dengan Bapak Bunirwan (pemilik ternak), tanggal 19 Mei 2014

ternak yang dikawukan tersebut berkembangbiak 7 anak, begitu juga dengan sistem perkaki apabila si pengawuk menumpang satu kaki maka si pengawuk akan mendapatkan anak pertama setelah ternak tersebut berkembangbiak 3 anak.

Sistem perjanjian kawukan ternak menurut hukum adat Besemah ini tentu saja berbeda dengan sistem-sistem perjanjian bagi hasil ternak yang ada di daerah lain, seperti sistem gaduhan ternak sapi bali di Kabupaten Luwu yang menunjukkan bahwa besar rata-rata keuntungan yang diperoleh peternak sistem gaduhan ternak sapi bali di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh lama pemeliharaan serta banyaknya penerimaan berupa sapi yang ditaksir kemudian di kurang dari biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak. Rendahnya keuntungan yang diperoleh peternak diakibatkan oleh biaya faktor-faktor produksi sangat besar seperti halnya tenaga kerja keluarga yang tidak diperhitungkan, pakan yang berasal dari rumput lapangan tidak dihitung sebagai faktor produksi, sedangkan perhitungan keuntungan semua hal tersebut sudah diperhitungkan, secara tunai peternak merasa untung dengan tenaga yang mereka tidak perhitungkan, dari hasil penelitian Hervian (2013) tentang bagi hasil pada pola gaduhan keuntungan yang diperoleh pemilik ternak lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh peternak, namun pola sistem gaduhan tetap terus dijalankan. Hal ini dikarenakan tidak ada pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dibuat secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian kawukan tidak bersifat tetap karena perjanjian kawukan ini bisa diperbaharui, hanya berdasarkan kepercayaan dan tolong menolong antara si pemilik dengan si pengawuk. Sistem perjanjian kawukan ini dilakukan oleh Pemilik ternak dan Pengawuk, ternak terlebih dahulu diketahui ternak mana dan harga ternak yang ingin dikawukan tersebut, ternak yang akan dikawukan harus diketahui di mana tempat ternak itu dilepas, ternak yang akan dikawukan harus dibicarakan terlebih dahulu bersama keluarga.
2. Pembagian hasil antara si pemilik dan pengawuk dalam perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu: Pembagian hasil ternak yang disesuaikan dengan modal pengawuk terhadap pemilik ternak, dimana sistemnya melalui pelantara kaki atau kuku ternak, apabila pengawuk membeli satu kaki dalam satu ekor ternak dihitung berdasarkan jumlah kaki artinya apabila ternak berkembangbiak menghasilkan satu anak

ternak, maka pengawuk mendapatkan satu kaki dari anak ternak tersebut, begitu juga dengan sistem kuku satu ekor ternak dibagi sesuai dengan jumlah kuku yang dibeli pengawuk, karena satu kaki terdiri dari dua kuku berarti dalam satu ekor terdapat delapan kuku, apabila pengawuk membeli satu kuku artinya jika ternak berkembangbiak maka pengawuk mendapatkan satu kuku.

## **B. Saran**

Diharapkan lebih dapat ditingkatkan adanya upaya sosialisasi seperti penyuluhan mengenai sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat serta mengerti tentang prosedur perjanjian khususnya mengenai bentuk perjanjian yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013
- Andry Harijanto Hartiman dkk, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2007
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, PT Pradyana Paramita, Jakarta, 1994
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1983
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 2010
- Djumadi, *Hukum Perubahan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perekonomian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Iman Sudiyat, *Hukum adat sketsa asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Jupriansyah, *Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum UNIB, 2014
- Merry Yono, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2002
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, 2006
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, 1981
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, 1967
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983,

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

## INTERNET

Herukuswanto, *Modul Hukum* <http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Adat-1-Pengertian-Hukum-Adat.pdf>.  
pukul. 21.45 wib. tanggal 04 Maret 2014

Rizki, *Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*,  
<http://eprints.uns.ac.id/9101/1/205541011201101361.pdf> Pukul. 21.43  
WIB. tanggal 26 Mei 2014

Tanpa nama, *Pengertian hukum adat*, <http://statushukum.com/pengertian-hukum-adat.html>.  
pukul. 21.45wib. tanggal 04 Maret 2014



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
( KESBANGPOL )**

Jl. Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas Kode Pos 38563  
☎ (0739) 61488 Fax. (0739) 61488

**REKOMENDASI**

Nomor : 700/ 48 /KBP-2/KK/2014

1. Dasar Surat Dekan Universitas Bengkulu Fakultas Hukum Nomor : 808/UN30.8/PP/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Izin penelitian yang salah satu tembusannya disampaikan Pada kami.
2. Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/919/KP2T/2014 . Tentang Penelitian :

Nama : **WIDARTO**  
NPM : **B1A010041**  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal : ***Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning.***

Lokasi Penelitian : Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur  
Waktu Penelitian : 14 Mei 2014 s/d 14 Juni 2014  
Penanggung Jawab : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

3. Pada prinsipnya Kepala kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kaur tidak Keberatan diadakan penelitian dimaksud.
4. Harus Mentaati semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
6. Apa bila masa berlaku rekomendasi penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
7. Seteiah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kesatuan bangsa Dan Politik Kabuapten kaur.
8. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak mentaati / tidak mengindahkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas.
9. Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untu dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 14 Mei 2014

KEPALA KANTOR

**H. IKA JONI IKHWAN, SE, MM.**  
NIP. 19750629 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur di Bintuhan ( Sebagai Laporan )
2. Kepala KPTSP Kabuapten Kaur di Bintuhan
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
**KECAMATAN TANJUNG KEMUNING**

Jl. Lintas Barat Tanjung Kemuning Kode Pos 38555  
Telepon (0739)..... Fax (0739).....  
Email.....

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 800 / ..205... / CTK/2014

Schubungan dengan surat dari Dekan Bidang Akademik UNIVERSITAS BENGKULU, Nomor: 808/UN.30.8/PP/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : WIDARTO  
NPM : B1A010041  
Fakultas : Hukum UNIB  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum

untuk melaksanakan penelitian dengan judul Skripsi :

**“PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR”**

Tempat Penelitian : 1. Desa Tanjung Kemuning  
2. Pelajaran  
3. Tinggi Ari  
Objek Penelitian : Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil)  
Lama Penelitian : Dari tanggal, 16 Mei s/d 16 Juni 2014

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Kemuning, Mei 2014  
an. CAMAT TANJUNG KEMUNING  
SEKCAM

td. Kasi PMD



**MULARSAN, A. Ma. Pd**

Perbina, (IV/a)

NIP. 19590202 197901 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING  
DESA PELAJARAN**

Jalan Raya Pelajaran Kode Pos 38555

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : // *124* / 001 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung

Kemuning Kabupaten Kaur menerangkan bahwa :

NAMA : Widarto

NPM : B1A010041

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 05 Tinggi Ari Kecamatan Tanjung

Kemuning Kabupaten Kaur

Telah mengadakan penelitian tentang "Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur", daribulan Mei s/d Juni 2014.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

Desa Pelajaran, Juni 2014



**KERISTIAN LUHUR**





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING  
DESA TANJUNG KEMUNING**

Jalan Lintas Barat Tanjung Kemuning Kode Pos 38555

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 107/TK-I/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tanjung Kemuning Kecamatan  
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menerangkan bahwa :

NAMA : Widarto  
NPM : B1A010041  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 05 Tinggi Ari Kecamatan Tanjung  
Kemuning Kabupaten Kaur

Telah mengadakan penelitian tentang "Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur", daribulan Mei s/d Juni 2014.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

Desa Tanjung Kemuning, Juni 2014

Kepala Desa Tanjung Kemuning



WIDI HARTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING  
DESA TINGGI ARI**

Jalan Raya Lintas Sumatera Tinggi Ari Kode Pos 38555

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : / 38 / 14 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menerangkan bahwa :

NAMA : Widarto

NPM : B1A010041

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 05 Tinggi Ari Kecamatan Tanjung  
Kemuning Kabupaten Kaur

Telah mengadakan penelitian tentang “Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”, daribulan Mei s/d Juni 2014.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

Desa Tinggi Ari, Juni 2014

Kepala Desa Tinggi Ari

